

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Pernyataan Keaslian .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	viii
Glosarium.....	x
Daftar Singkatan .....	xi
Ringkasan Desertasi .....	xii
Daftar Isi .....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Permasalahan .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Kerangka Konseptual .....	11

F. Kerangka Teori .....	16
G. Metode Penelitian .....	66
H. Orisinalitas Penelitian .....	72
I. Sitematika Penulisan.....	73

## BAB II : TINJAUAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup .....	75
2.2. Faktor Penyebab Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....	77
2.3. Subyek Sengketa Kewenangan Lembaga Negara .....	79
2.4. Obyek Sengketa Lembaga Negara .....	88
2.5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara .....	94
2.6. Sengketa Kewenangan Dalam Perspektif Konstitusionalisme.....	100
2.7. Perbandingan Sengketa Kewenangan di Beberapa Negara .....	106

## BAB III : PERBANDINGAN STRUKTUR DAN KEWENANGAN DPD-RI

### DENGAN DPR-RI

3.1. DPD-RI.....	111
3.2. DPR-RI.....	131
3.4. Perbandingan Struktur dan Kewenangan DPD-RI dengan DPR-RI.....	161

3.5. Analisis kewenangan DPD dengan DPR Dalam Sistem Bikameral .....	166
--	-----

**BAB IV : SENGKETA KEWENANGAN DPD-RI DENGAN DPR-RI DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI.**

4.1. Faktor Penyebab Sengketa Kewenangan DPD-RI dengan DPR-RI.....	177
--	-----

4.2. Obyek Sengketa Kewenangan Legislasi DPD dengan DPR-RI .....	188
--	-----

4.3. Tanggapan DPR Terhadap Gugatan DPD.....	206
--	-----

4.4. Analisis Sengketa Kewenangan Legislasi DPD-RI dengan DPR-RI.....	224
---	-----

**BAB V : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN DPD-RI DENGAN DPR-RI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI**

5.1. Model Persuasif Dialogis.....	230
------------------------------------	-----

5.2. Pengajuan Gugatan Melalui Perkara Nomor 92/PUU-X/2012.....	234
---	-----

5.3. Hasil Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012.....	240
--	-----

5.4. Sikap DPD dan DPR Terhadap Putusan Nomor 92/PUU-X/2012.....	248
--	-----

5.5. Pengajuan Gugatan Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014.....	261
---	-----

5.6. Hasil Putusan Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014.....	274
---	-----

5.7. Implikasi Hasil Sengketa Kewenangan Legislasi DPR dan DPD.....	283
---	-----

5.8. Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kewenangan .....	291
--	-----

**BAB VI : REKONSTRUKSI PENANGANAN SENGKETA KEWENANGAN LEGISLASI DPD-RI DENGAN DPR-RI**

6.1. Penyempurnaa Sistem Bikameral Mencegah Sengketa Kewenangan .....	299
---	-----

6.2. Pergeseran Mekanisme Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....	304
6.3. Alternatif Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara .....	315
6.4. Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara .....	320
6.5. Implikasi Teoritis.....	334

## BAB VII : KESIMPULAN

7.1. Simpulan.....	343
7.2 Implikasi Kajian .....	347

Daftar Pustaka